

MENTERI AGAMA DIMINTA LAKUKAN EVALUASI

PWNU DIY Tolak Lima Hari Sekolah di Madrasah

YOGYA (KR) - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta (PWNU DIY) menolak segala bentuk kebijakan yang mengarah kepada melemahnya partisipasi masyarakat dalam membangun karakter dan akhlak mulia anak bangsa. Terkait hal ini, PWNU DIY menolak kebijakan lima hari sekolah bagi Madrasah di DIY, karena akan mendegradasi peran Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al Qur'an dan lembaga pendidikan berbasis masyarakat lainnya.

Demikian pernyataan sikap PWNU DIY yang ditandatangani KH Mas'ud Masduki (Rais Syuriah), KH Mukhtar Salim MAG (Katib Syuriah), Dr H A Zuhdi Muhdlor SH MHum (Ketua Tanfidziyah) dan Dr H Muhajir MSI (Sekretaris Tanfidziyah) yang disampaikan ke KR, Jumat (10/8). Pernyataan sikap ini disampaikan menyusul keluarnya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

DIY No. 407 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Hari Sekolah Bagi Madrasah DIY yang antara lain isinya Hari Sekolah bagi Madrasah Negeri di DIY adalah lima hari, yaitu Senin sampai Jumat.

Terkait keluarnya SK tersebut, PWNU DIY meminta Menteri Agama RI untuk mengevaluasi segala bentuk kebijakan yang ada di Kanwil Kemenag DIY, khususnya tentang penyelenggaraan Pendi-

dikan Madrasah. Disamping itu, menginstruksikan kepada seluruh PCNU, MWC NU dan Pengurus Ranting NU Se-Wilayah DIY untuk meningkatkan peran serta dalam mengelola pendidikan Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) di lingkungannya masing-masing.

Mengenai pertimbangan penolakan tersebut antara lain bahwa proses pembelajaran di Madrasah harus mempertimbangkan aspek psikologi siswa, terlebih daya tahan belajar siswa (*student engagement*) sehingga proses pembelajaran tidak boleh melahirkan generasi yang mengalami *spiritually dumb*. Pemberlakuan 5 hari sekolah di Madrasah akan berdampak pada eksistensi Madrasah Diniyyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an. Kanwil Kemenag DIY dituntut untuk me-

ngembangkan lembaga pendidikan keagamaan seperti Madrasah Diniyah, TPA dan lembaga pendidikan agama lain. Pemerintah juga wajib menjamin penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana amanat UU 18/2019 tentang Pesantren.

Selain itu, Perpres No 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara memberikan pengecualian bagi Instansi Pemerintah untuk kepentingan pelayanan publik. Sedangkan Kanwil Kemenag DIY merupakan unit kerja yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat, termasuk yang terkait dengan layanan madrasah sebagaimana di atur dalam UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik. **(Fie)** -f

Komitmen UJB Bantu Pemda DIY Atasi Masalah Sampah

YOGYA (KR) - Universitas Janabadra Yogyakarta (UJB) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertema 'Mengurai Sampah Yogyakarta' di Ruang Multipurpose, Kampus Pusat UJB, Jalan Tentara Rakyat Mataram Yogyakarta, Kamis (10/8). Ini menjadi upaya UJB berkontribusi membantu pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan sampah di DIY.

FGD ini juga dalam rangka Lustrum XIII UJB diikuti oleh berbagai instansi Pemda terkait, para pemerhati dan pelaku pengelolaan sampah serta para dosen di lingkungan Universitas Janabadra.

Menghadirkan tiga narasumber utama sebagai pemantik diskusi yaitu, Aris Prasena SSI MSc (Kabid Sarpras Pemerintah Daerah DIY), Drs Tri Agung R Bsw (WWF Indonesia) dan Dr Eng Mochamad Syamsiro ST MT (dosen FT UJB sekaligus Tenaga Ahli PSEL Putri Cempo Solo) dipandu moderator Ir B Tresno Sumbodo MSi (dosen FP UJB sekaligus Kepala Humas Kerjasama dan KUI UJB). FGD dibuka oleh Rektor UJB Dr Risdianto ST MT. Untuk mengurangi sampah plastik, panitia menyediakan tumbler sebagai tempat minum peserta FGD. Sehingga diharapkan tumbler tersebut



KR-Devid Permana

Narasumber menyampaikan paparan di FGD UJB.

bisa dipakai seterusnya sebagai pengganti air minum kemasan.

Aris Prasena memaparkan antara lain tentang regulasi pengolahan sampah di DIY yaitu Perda Nomor 3 tahun 2013. Menurutnya, dalam pasal 8 Perda tersebut diatur bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan dengan cara pengurangan sampah dan penanganan sampah. Upaya pengurangan sampah dilakukan dengan pembatasan timbunan sampah, daur ulang sampah atau pemanfaatan kembali sampah.

Sementara itu, Tri Agung mengatakan, WWF terus menggaungkan Plastic Smart Cities (PSC) untuk mengurangi sampah plastik di kota-kota di seluruh dunia. Yaitu melalui slogan 'No Plastic in Nature (NPIN)'. Beberapa peluang dapat dimaksimalan seperti, pengelolaan sampah berbasis sir-

cular economy, banyaknya kelembagaan pengelolaan sampah di masyarakat, banyak start-up di bidang inovasi pengelolaan sampah.

Mochamad Syamsiro menyampaikan materi tentang intervensi teknologi untuk pengolahan sampah berdaya guna. Ia merekomendasikan agar segera dibangun unit pengolahan sampah skala besar di TPA Piyungan seperti PLTSA/PSEL dan RDF (khususnya dengan teknologi termal) berkapasitas 600-800 ton per hari. Kemudian, perlu disiapkan lahan TPA Sementara untuk menampung sampah dalam jangka waktu 1-2 tahun.

Rektor UJB Risdianto menuturkan, permasalahan sampah di DIY, bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan butuh peran aktif dari masyarakat luas, swasta/bisnis termasuk sumbangan pemikiran dari para akademisi. **(Dev)-f**

KORBAN KEBAKARAN PEROLEH BANTUAN

Pemkot Kembali Ingatkan Larangan Pembakaran Sampah

YOGYA (KR) - Hingga saat ini masih ditemukan sejumlah warga yang melakukan pembakaran sampah di pekarangan. Pemkot Yogya pun kembali mengingatkan larangan pembakaran sampah karena sudah diatur dalam regulasi berupa perda terkait pengelolaan persampahan.

Penjabat (Pj) Walikota Yogya Singgih Raharjo, mengaku dampak pembakaran sampah bukan hanya pencemaran udara atau lingkungan melainkan juga bisa merembet pada kejadian kebakaran yang lebih besar. "Sudah ada kejadian kan pembakaran sampah yang sampai merembet ke rumah. Kita sudah meminta kelurahan untuk mengedukasi masyarakat agar tidak membakar sampah," katanya di sela pemberian bantuan sosial bagi korban kebakaran, Jumat (11/8).

Menurutnya, sudah tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk tidak mengelola sampah yang diproduksinya. Pemkot telah menyampaikan berbagai metode sekaligus memberikan contoh atau kete-

ladanan dalam pengelolaan sampah. Bagi sampah organik dapat dikelola melalui biopori maupun pakan maggot. Sedangkan sampah anorganik diserahkan ke bank sampah. Kemudian residu yang tidak terkelola diserahkan ke depo.

Singgih mengaku, semua depo saat ini telah dioperasikan. Bahkan para penggerobak juga mulai ditata untuk kembali beroperasi seperti biasa. "Dari regulasi kan sudah ada larangan membakar sampah. Itu kita edukasi terus melalui aparat di kelurahan maupun forum bank sampah. Terhadap residu yang ada di depo, langsung kita pres untuk disalurkan ke pihak yang telah bekerja sama," urainya.

Kepala Sat Pol PP Kota Yogya Octo Noor Arafat, mencatat ada tujuh lokasi pembakaran sampah yang sempat ditertibkannya. Tiga kasus di antaranya bahkan merembet hingga menyebabkan kebakaran. Namun musibah itu sudah bisa ditangani dan tidak menimbulkan korban. Hanya, tindakan membakar sampah

tetap tidak dibenarkan. "Oknum yang membakar sampah itu ternyata tidak semua warga kota. Bagi warga kota, sudah kami berikan peringatan. Ketika nanti kembali melanggar bisa kami kenakan yustisi," katanya.

Sementara itu, Octo yang menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogya ini mengungkapkan, setiap korban kebakaran akan mendapatkan bantuan sosial. Kemarin total bantuan yang disalurkan mencapai Rp 77 juta untuk tujuh keluarga yang menjadi korban kebakaran dalam kurun waktu 12 Juni hingga 16 Juli 2023. Masing-masing korban mendapatkan bantuan bervariasi. Paling kecil Rp 2 juta dan tertinggi Rp 17 juta. Bantuan itu berdasarkan regulasi berupa Perwal 42/2017. "Sebagian besar musibah kebakaran itu dipicu oleh konsleting listrik. Ini menjadi pengalaman kita semua agar senantiasa memperhatikan instalasi listrik pada aspek kualitas dan menata sesuai standar," tandasnya. **(Dhi)-f**

Pemda DIY Gelar Konser Orkestra Serenade

YOGYA (KR) - Kegiatan HUT ke-78 Kemerdekaan RI di lingkungan Pemda DIY akan dilaksanakan 14 - 26 Agustus 2023, diisi dengan pemberian remisi bagi para narapidana, malam tirakatan, upacara bendera di Istana Kepresidenan Gedung Agung, penurunan bendera sampai pawai kemerdekaan di Malioboro.

"Peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan RI kali ini sudah tidak ada lagi pembatasan, jadi digelar seperti sebelum pandemi. Begitu pula dengan pawai kemerdekaan akan diadakan pada 26 Agustus di sepanjang jalan Malioboro. Untuk itu masyarakat kami minta bisa proaktif untuk menyemarakkan kegiatan ini," kata ketua panitia sekaligus Asisten



KR-Riyana Ekawati

Sumadi dan Budi Husada saat memberikan keterangan kepada media di Gedhong Pracimosono.

Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum, Setda DIY Sumadi di Gedhong Pracimosono Kompleks Kepatihan, Jumat (11/8).

Hadir dalam acara itu Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman Dinas Kebudayaan DIY Budi Husada. Menurut Budi untuk

menyemarakkan HUT ke-78 Kemerdekaan RI Dinas Kebudayaan (Kundha Kebudayaan) DIY akan mengadakan Konser Serenade Bunga Bangsa. Rencananya konser yang diadakan di Concerthall Taman Budaya Yogyakarta (TBY) itu akan melibatkan 80 musisi dan terbuka untuk umum. Konser tersebut bertujuan

untuk menginternalisasi rasa cinta Tanah Air, nasionalisme dan kebanggaan akan Indonesia bagi para pelaku yang terlibat maupun masyarakat yang hadir sebagai audiens.

"Konser Serenade Bunga Bangsa #9 diselenggarakan sebagai bagian dari perayaan HUT ke-78 Republik Indonesia dan menyambut hari Keistimewaan DIY. Kedua momentum bersejarah tersebut memberi nafas dan semangat bagi konser ini sehingga penyelenggara mengambil tajuk Istimewa Yogyakarta, Indonesia Maju. Rencananya konser akan dilaksanakan pada 19 Agustus, open gate pukul 18.00, terbuka untuk masyarakat umum," terang Budi. **(Ria)-f**

‘SIBAKUL MALIOBORO MENARI’

Libatkan 1.000 Penari, Siap Pecahkan Rekor MURI

YOGYA (KR) - Sebanyak 1.000 peserta berpakaian tradisional siap menari bersama dalam even "SiBakul Malioboro Menari", 2 September 2023 di sepanjang Jalan Malioboro. Even kolosal yang dihelat Dinas Koperasi UKM DIY ini untuk semakin mengenalkan SiBakul, platform digital Pembinaan Sirkular Diskop UKM DIY bagi pelaku Koperasi dan UKM yang berkembang pesat dalam perluasan akses pemasaran produk UMKM.

"Juga sebagai bentuk usaha pelestarian budaya serta memecahkan Rekor MURI line dance dengan menggunakan pakaian tradisional terbanyak," tutur Kepala



KR-Juvintarto

Panitia menyampaikan pers conference even "SiBakul Malioboro Menari".

Dinas Koperasi UKM DIY, Ir Srie Nurkyatsiwi MMA saat Press Conference, Jumat (11/8) siang di Kantor Dinkop UKM DIY, Jalan HOS Cokroaminoto No 162 Yogya.

Didampingi Direktur PT

Kirana Adhirajasa Indonesia selaku Ketua Tim Pelaksana Hairullah Gazali SE MBA, Sairi sapaan akrabnya menyebutkan pakaian tradisional yang akan digunakan berasal dari asal peserta masing-masing daerah penjur

nusantara melambangkan Yogya sebagai miniatur Indonesia. "Dipilihnya Malioboro untuk mendukung Jogja Menuju Warisan Dunia dan bagian dari rangkaian HUT ke-11 Keistimewaan Jogja," jelasnya.

Acara yang didukung Dana Keistimewaan DIY ini, lanjut Siwi bakal dimeriahkan berbagai acara hiburan lainnya seperti pementasan musik dan pembagian e-voucher gratis bagi 1.000 orang pertama yang hadir dan dapat ditukarkan secara langsung di outlet-outlet UKM di Teras Malioboro 1. "Harapannya bisa dinikmati semua kalangan yang berkunjung di Malioboro," ujarnya. **(Vin)** -f

Sosialisasi JDIH Perlu Digencarkan

YOGYA (KR) - Keberadaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) baik dari tingkat pusat hingga daerah sangat diperlukan masyarakat. Sosialisasi JDIH juga harus terus digencarkan lantaran bentuk dan produk hukum selalu dinamis.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogya Yunianto Dwisutono, mengungkapkan hukum merupakan peraturan legal yang mempunyai kekuatan untuk mengatur lalu lintas kegiatan manusia, serta menjadi payung perlindungan terhadap hak asasi, tata aturan, dan ketertiban kehidupan. "Bentuk dan produk hukum sangatlah dinamis. Dinamis ini memiliki arti berkembang sesuai dengan peradaban manusia itu sendiri. Oleh karena itu adanya pemahaman akan JDIH, merupakan salah satu syarat agar pemerintah dapat memahami dan melakukan pembinaan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan," urainya, Jumat (11/8).

Sebagai negara hukum, imbuhnya,

maka setiap produk hukum yang diterbitkan harus terpublikasikan secara masif. Hal ini karena produk hukum tersebut menjadi pedoman sekaligus perlindungan bagi masyarakat. Masyarakat selama ini bisa mengakses berbagai produk hukum melalui menu JDIH di tiap laman resmi pemerintah. Sehingga di internal pemerintah juga harus menyajikannya secara update.

Dirinya menambahkan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan juga merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik. JDIH Kota Yogya juga memiliki misi untuk mewujudkan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi hukum secara sistematis. Untuk mewujudkan misi tersebut, lanjutnya, diperlukan konsistensi dan komitmen dari seluruh ASN Pemkot Yogya. "Semua ini juga untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan," ujarnya. **(Dhi)-f**

Seremonial Penyerahan Penghargaan Lomba Desa/Kampung Wisata Tingkat DIY Tahun 2023 Akan Dihadiri Gubernur DIY



Rapat koordinasi seremonial penyerahan penghargaan Lomba Desa Wisata Tingkat DIY di Kantor Dispar DIY

KR - Istimewa

YOGYA (KR) - Sebagai tindak lanjut dari penilaian Lomba Desa Wisata Tingkat DIY Tahun 2023, Dinas Pariwisata DIY mengadakan Seremonial Penyerahan Penghargaan Lomba Desa Wisata Tingkat DIY. Seremonial Penyerahan Penghargaan Lomba Desa Wisata Tingkat DIY rencananya dilaksanakan di Eastparc Hotel Yogyakarta pada Senin (21/8). Acara tersebut akan dihadiri oleh Gubernur DIY, OPD terkait, stakeholder pariwisata DIY, komunitas pariwisata dan pemerhati serta pelaku wisata lainnya.

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dra.Titik Sulistiyaning mengatakan, pihaknya telah melakukan serangkaian kegiatan Lomba Desa Wisata Tingkat DIY Tahun 2023 dimulai dengan pengumpulan profil dan dokumen pendukung. Selanjutnya profil dan dokumen pendukung dicermati Tim Juri yang diketuai GKR Bendara lalu dilanjutkan verifikasi dan kunjungan lapangan. Sebelumnya Tim Juri melakukan reservasi di Desa Wisata bertindak sebagai pengunjung. Dalam kunjungan tersebut Tim Juri mencoba paket wisata unggulan dan menginap di homestay sembari melakukan observasi dan penilaian.

Titik menjelaskan adanya Lomba Desa Wisata Tingkat DIY Tahun 2023 tersebut sebagai bentuk apresiasi terhadap pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (Community Based Tourism/CBT) sekaligus sebagai upaya evaluasi dan meningkatkan daya saing desa/kampung wisata di DIY. Peserta lomba adalah 15 desa/kampung wisata di 4 Kabupaten/Kota di DIY yang sebelumnya sudah diusulkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota. Ke 15 peserta tersebut terdiri dari masing-masing 3

desa/kampung wisata dan homestay yang ada di Bantul, Sleman, Kota Yogyakarta, Kulon Progo dan Gunungkidul.

"Rangkaian kegiatan secara keseluruhan dilaksanakan selama lima bulan yaitu pada bulan April hingga Agustus 2023. Pengumpulan dokumen dan seleksi administrasi dilakukan pada bulan April, lalu dilanjutkan dengan verifikasi dan kunjungan lapangan pada bulan Mei-Juli 2023. Kami juga akan menyelenggarakan seremonial penyerahan penghargaan Lomba Desa Wisata Tingkat DIY kepada enam Desa/Kampung Wisata dan enam Homestay terbaik pada 21 Agustus 2023 di Eastparc Hotel Yogyakarta. Nantinya Gubernur DIY Sri Sultan HB X yang akan menyerahkan penghargaan" kata Titik.

Pemenang dan finalis lomba akan mendapatkan trophy, sertifikat dan uang pembinaan dari Dinas Pariwisata DIY. Uang pembinaan Lomba Desa/Kampung Wisata masing-masing juara 1 sebesar Rp. 50.000.000, juara 2 Rp.45.000.000, juara 3 Rp.40.000.000, juara Harapan 1 Rp.35.000.000, Harapan 2 Rp.30.000.000, Harapan 3 Rp.25.000.000, sedangkan uang pembinaan finalis lomba sebesar Rp.3.000.000. Seluruh pelaksanaan Lomba Desa/Kampung Wisata dan Homestay Tingkat DIY Tahun 2023 menggunakan Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2023 melalui Dinas Pariwisata DIY.(*)